



SIARAN PERS

Rabu, 20 November 2024

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kabupaten Blitar Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari 248 kelurahan/desa di 22 Kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut:

Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdatra di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU).

Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara).

Ketiga, politik uang.

Keempat, politsasi SARA.

Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa).

Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan).

Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

7 (Tujuh)* Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 679 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 2) 661 TPS Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS
- 3) 236 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 4) 233 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 5) 57 Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
- 6) 24 Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
- 7) 16 Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu

14 (Empat Belas)* Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

- 1) 67 Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu
- 2) 52 ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
- 3) 24 Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
- 4) 22 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
- 5) 17 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)

- 6) 16 TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon
- 7) 11 Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara
- 8) 7 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih
- 9) 3 Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)
- 10) 3 TPS didirikan di wilayah rawan konflik
- 11) 2 Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS
- 12) 2 Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon
- 13) 2 Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara
- 14) 2 Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS

1 (Satu)* Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

1 TPS yang terdapat Praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,

- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu Kabupaten Balitar juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam di Kabupaten Blitar

No	Variabel	Indikator	Jumlah TPS	Kecamatan	Ket.
			Rawan		
1	Penggunaan Hak Pilih	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);	679	Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Nglegok, Panggungrejo, Sanankulon, Selopuro, Selorejo, Srengat, Sutojayan, Talun, Wates, Wonodadi, Wonotirto,	
		2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);	233	Bakung, Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kademangan, Kanigoro, Kesamben,	

			Nglegok, Panggungrejo, Ponggok, Sanankulon, Selopuro, Srengat, Sutojayan, Talun, Udanawu, Wates, Wlingi, Wonodadi	
	3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);	73	Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kademangan, Kanigoro, Ponggok, Sanankulon, Selopuro, Selorejo, Srengat, Sutojayan, Wates, Talun, Wonodadi	
	4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	236	Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Panggungrejo,	

				Sanankulon, Selopuro, Selorejo, Srengat, Sutojayan, Talun, Wates, Wlingi, Wonodadi	
		5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;	652	Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Nglegok, Panggungrejo, Ponggok, Sanankulon, Selorejo, Srengat, Sutojayan, Talun, Udanawu, Wates, Wlingi, Wonodadi, Wonotirto	
		6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS	-	-	Tidak ada TPS yang menggunakan sistem noken di Kabupaten Blitar

		yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);			
		7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).	2	Binangun, Garum	
2	Keamanan	1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;	2	Binangun, Udanawu	
		2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan.	2	Binangun, Selopuro	
		3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	1	Garum	

3	Politik Uang	1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;	57	Garum, Selopuro	
4	Politisasi SARA	2. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.	1	Talun	
5	Netralitas	1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	4	Nglegok, Garum, Selorejo	
		2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang	40	Selopuro	

		menguntungkan atau merugikan pasangan calon.			
6	Logistik	1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;	67	Doko, Kademangan, Kanigoro, Panggungrejo, Selopuro, Sutojayan, Udanawu	
		2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;	16	Kademangan, Kanigoro, Panggungrejo, Talun, Udanawu	
		3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan	-	-	Tidak pernah terjadi keterlambatan dalam pengiriman logistik di kepemiluan di

		penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.			Kabupaten Blitar
7	Lokasi TPS	1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);	24	Bakung, Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kesamben, Panggungrejo, Selopuro, Sutojayan, Wates, Wlingi, Wonotirto	
		2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;	2	Doko	
		3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);	17	Binangun, Gandusari, Garum, Panggungrejo, Selopuro, Sutojayan, Wates, Wlingi, Wonotirto	
		4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak	7	Garum, Kesamben, Selopuro, Sutojayan,	

		pilih;			
		5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);	6	Binangun, Kesamben, Ponggok, Sanankulon, Srengat,	
		6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	16	Binangun, Gandusari, Garum, Kademangan, Kanigoro, Sanankulon, Talun, Udanawu, Wates	
		7. TPS di lokasi khusus.	0	0	DI Kabupaten Blitar tidak ada TPS Lokasi Khusus
8	Jaringan Internet dan Listrik	1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;	24	Binangun, Doko, Gandusari, Kademangan,	

				Kesamben, Panggungrejo, Selopuro, Udanawu, Wates, Wonotirto	
		2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.	2	Wates	

FOTO – FOTO

